



ISSN (P) : 2086-4264

ISSN (E) : 2581-2343

Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi

Chife in Editor

Nurlaila MC., S.E., M.Acc., Ak., C.A.,
C.Li., C.Ra
(Universitas Islam 45)

Editorial Board

Intan Immanuella, SE.,M.SA
(Universitas Katolik Widya Mandala)

Vita Aprilina, SE.,M.Si.,AK.,CA
Yuha Nadhirah Q., S.E., M.Ak.
(Universitas Islam 45)

Reviewers

Prof.Dr. M. Nizarul Alim,
SE.,M.Si.,CA.
Univeristas Trunojoyo, Madura

Ihsan Nasihin, S.Ak., M.Ak.
(Universitas Buana Perjuangan
Karawang)

Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah,
SE.,M.S. Ak.
Univeristas Padjajaran

Gafar Hafiz Sagala, S.Pd.,M.Sc
Universitas Negeri Medan

Dr. Sugiyarti Fatma Laela, M. Buss. Acc.
CMA,
Institut Tazkia

Andi Manggala Putra, SE., M.Sc.
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Dr. Icuk Rangga Bawono,
SH.,SE.,M.Si.,MH.,Ak.,CA
Univeristas Jendral Soedirman

Mohammad Iqbal Firdaus, SE., M.Ak.
Universitas Negeri Malang

Ahalik,
SE.,Ak.,M.Si.,Ak.,CMA.,CPMA.,CPSA
K.,DipIFR.,CPA.,CACP.,ACPA.,CA
Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Purnama Putra, SE.,M.Si
Universitas Islam 45, Indonesia

Hadi Mahmudah, SE.,M.Sc
Universitas Islam 45, Indonesia

Kantor Redaksi

Gedung D, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam "45" Bekasi. Jl. Cut Meutia No.83
Bekasi. 17113. Telp/fax. (021) 88349033 (Direct); (021) 8808850 (Hunting), Ext. 130:
Fax. (021)8801192

Website: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>; Email: jrak@unismabekasi.ac.id atau
jrakunisma@gmail.com

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

¹ Vandalucia Faradhilah Verose

² Isna Putri Rahmawati*

^{1,2} Universitas Sebelas Maret

¹ isnaputrirahmawati@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2019. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: *kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, agresivitas pajak*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of corporate ownership structure consisting of concentrated ownership, government ownership, institutional ownership, and foreign ownership on tax aggressiveness. The number of samples used in this study was 200 taken from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2019. The results found that concentrated ownership and foreign ownership had a negative effect on tax aggressiveness, while institutional ownership had a positive effect on tax aggressiveness. Meanwhile, government ownership has no significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: *concentrated ownership, government ownership, institutional ownership, foreign ownership, tax aggressiveness*

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, penerimaan yang berasal dari pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan proporsi penerimaan pajak per tahunnya. Tetapi kenaikan penerimaan tersebut tidak sejalan dengan *tax ratio* Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lainnya di Asia. Menurut Laporan Kementerian Keuangan mengenai APBN tahun 2019 besarnya presentase *tax ratio* Indonesia sebesar 12,2%. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah masih terbukanya celah dalam setiap kebijakan perpajakan sehingga banyak pihak dengan mudah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak (Kurniati 2020).

Pajak memiliki arti penting yang berbeda bagi pemerintah maupun wajib pajak. Bagi pemerintah pajak bermanfaat untuk pembangunan dan pengeluaran negara, sedangkan bagi wajib pajak khususnya perusahaan, pajak menjadi beban yang sifatnya mengurangi pendapatan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memiliki strategi yang dianggap legal

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (Lee dan Kao 2018). Menurut Lietz (2013) perencanaan pajak terdiri dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dianggap ilegal, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dianggap legal serta agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) yang dianggap sebagai tindakan yang memanfaatkan celah peraturan.

Terjadi banyak fenomena perencanaan pajak yang terjadi di Indonesia baik yang berasal dari transaksi dalam negeri ataupun luar negeri. Contoh kasus perencanaan pajak yang berasal dari transaksi dalam negeri adalah kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Grup (AAG). Menurut *The Indonesian Legal Center*, manajer perusahaan sengaja melakukan manipulasi pengisian SPT pajak dari tahun 2002-2005. Sedangkan untuk kasus perencanaan pajak yang dilakukan lintas negara atau *transfer pricing* seperti dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* bahwa perusahaan British American Tobacco melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama di Indonesia.

Banyaknya kasus mengenai penyelewengan pajak diakibatkan oleh rendahnya efektivitas penerapan *corporate governance* (CG) di Indonesia. Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* internal (Denis dan Mcconnell, 2003). Struktur kepemilikan dan pengendalian dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer di dalam perusahaan. Salah satu tindakan manajemen yang terkait dengan kepentingan pemilik adalah masalah agresivitas pajak. Ying dkk. (2017) menyatakan bahwa rendahnya efektivitas *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan dimanfaatkan oleh pihak manajer untuk terlibat dalam agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut akan membawa manfaat individu dan dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini membagi struktur kepemilikan menjadi kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan institusi dan kepemilikan pemerintah.

Kepemilikan keluarga merupakan bagian kepemilikan terbesar di Asia (Setiawan dkk., 2015). Rata-rata kepemilikan keluarga di Indonesia adalah 57,3%. Hal ini berarti kepemilikan keluarga memiliki peran yang signifikan Indonesia. Selain kepemilikan keluarga, jenis kepemilikan juga beragam di Indonesia yaitu kepemilikan manajerial, pemerintah, institusional dan asing. Selain itu, struktur kepemilikan dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu struktur kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*) dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (*ownership concentration*) (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer 1999).

Struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap keputusan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham memiliki hak kontrol yang signifikan. Kepemilikan pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta manajer dalam perusahaan. Pemerintah lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan salah satunya untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak (Jian, Li, dan Zhang 2012; Zeng 2010). Struktur kepemilikan institusional berorientasi pada tujuan jangka panjang dibandingkan mengejar laba jangka pendek. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghindari agresivitas pajak yang akan merugikan perusahaan (Khurana 2009). Struktur kepemilikan berikutnya adalah kepemilikan oleh pihak asing. Investor asing membantu

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati
JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

perusahaan untuk memahami strategi dan prosedur yang lebih baik guna meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Barros dan Sarmento 2020).

Penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar (kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing) terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hadi dan Mangoting (2014), Pratiwi dan Ardiyanto (2018), Ying dkk. (2017) dan Zeng (2010) menemukan hasil bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Masripah dkk. (2014) memberikan hasil bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil mengenai struktur kepemilikan pemerintah juga tidak konsisten, Chan dkk. (2013), Zeng (2010), dan Zhang (2012) menemukan pengaruh negatif antara kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Pratiwi dan Ardiyanto (2018) dan Ying dkk. (2017) menemukan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Bukti mengenai kepemilikan institusional juga memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu seperti Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2020), Khurana dan Moser (2013), Maraya dan Yendrawati (2016), dan Ying dkk. (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil ditemukan oleh Khan, Srinivasan, dan Tan (2017) yang menunjukkan hasil positif antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak. Akan tetapi beberapa peneliti menunjukkan hasil tidak signifikan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (Firmansyah 2018; Setyawan, Wahyuni, dan Juanda 2019; Turyatini 2017). Bukti tidak konsisten juga terjadi pada penelitian mengenai kepemilikan asing seperti penelitian Alkurdi dan Mardini (2020), Annuar dkk. (2014), Salihu dkk. (2015) yang menunjukkan hasil positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Hasan dkk. (2016) yang menunjukkan hasil negatif antara kepemilikan asing dengan agresivitas pajak.

Penelitian ini termotivasi dari Ying dkk. (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak di China. Struktur kepemilikan tersebut mencakup kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menambahkan faktor kepemilikan asing pada struktur kepemilikan yang dilakukan di Indonesia, alasan penelitian ini karena struktur kepemilikan merupakan salah satu bagian dari corporate governance yang menunjukkan hasil yang masih belum konsisten sehingga perlu banyak dilakukan uji empiris. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan yang mencakup kepemilikan terkonsentrasi, pemerintah, institusional dan asing terhadap agresivitas pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi pertama kali dikenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemegang saham

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati
 JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

sebagai pihak prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen. Dalam hal pengelolaan perusahaan, terjadi penyerahan wewenang dari pemegang saham kepada manajemen yang nantinya akan menimbulkan masalah agensi. Menurut Utamaningsi (2020) masalah agensi timbul karena terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan dari antar pihak. Pemegang saham sebagai pihak pemilik bertujuan untuk memaksimalkan investasinya sedangkan manajer sebagai pihak pengelola perusahaan bertujuan untuk mendapatkan insentif dari hasil kerjanya.

Denis dan Mcconnell (2003) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan merupakan mekanisme internal dari *corporate governance*. Adanya perbedaan jenis kepemilikan dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada nilai perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat risiko yang tinggi. Mekanisme *corporate governance* mampu memberikan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan manajemen agar melakukan perencanaan pajak yang baik. Hal ini sesuai dengan Ying dkk. (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan yang kuat harus dapat meminimalkan masalah keagenan mereka sehubungan dengan posisi pajak dan mencapai tingkat agresivitas pajak yang optimal dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah tanpa disadari dapat memberi manajer peluang untuk memanfaatkan ketidakpastian dalam sistem pajak, dan keuntungan informasi mereka, untuk terlibat dalam agresivitas pajak yang memberi mereka keuntungan pribadi dengan mengorbankan kekayaan pemegang saham. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan terdiri dari kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar seperti institusional, pemerintah, manajerial, dan asing.

Hipotesis

Struktur kepemilikan terkonsentrasi dikategorikan sebagai pihak pengendali dalam perusahaan karena besarnya presentase hak suara yang dimiliki (Hidayati dan Diyanty 2018). Kepemilikan terkonsentrasi mampu meringankan masalah keagenan dikarenakan pemegang saham pengendali memiliki kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas manajer agar menguntungkan (Hadi dan Mangoting 2014). Sebagai pihak pengendali perusahaan, kepemilikan saham oleh pihak terkonsentrasi mampu mempengaruhi setiap keputusan perusahaan. Menurut Badertscher dkk. (2013) dan Masripah dkk. (2014) pemegang saham pengendali cenderung meminimalisir kegiatan yang memberikan biaya melebihi manfaat yang diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan Chen dkk. (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan tindakan seperti penghindaran pajak dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Menurut Hidayati dan Diyanty (2018) agresivitas pajak memiliki manfaat dan biaya yang timbul. Manajemen cenderung terlibat dalam agresivitas pajak jika manfaat (kewajiban pajak berkurang, arus kas meningkat dan mudah dalam mencari pinjaman) melebihi biaya yang diperoleh (biaya audit, biaya ahli pajak, biaya sanksi) (Scholes dkk. 2005; Shackelford dan Shevlin 2001).

H₁: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah biasa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

2016 BUMN merupakan perseroan terbatas yang sahamnya sebesar 51% dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengejar keuntungan. Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah juga ikut menyumbangkan pajak dari hasil operasi perusahaan. Hal tersebut terbukti dari penelitian Chan dkk. (2013); Jian dkk. (2012) dan Zeng (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan milik pemerintah membayar pajak lebih tinggi. Bradshaw (2018) dan Chan dkk. (2013) menjelaskan bahwa manajer pada perusahaan pemerintah diberikan insentif berupa promosi jabatan serta dievaluasi dan diawasi langsung oleh pemerintah sehingga hal tersebut membuat manajer tunduk kepada pengawasan negara sehingga lebih meminimalisir kegiatan yang berisiko seperti agresivitas pajak.

H₂: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan institusi merupakan kepemilikan saham oleh suatu institusi atau lembaga, seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi dari luar negeri dan lembaga institusi lainnya (Maraya dan Yendrawati 2016). Kepemilikan institusi mampu mengurangi masalah keagenan karena perannya sebagai pihak *monitoring* aktivitas manajer (Jensen dan Meckling 1976). Sebagai pihak eksternal, institusi memiliki peran dalam memantau dan mendisiplinkan manajer agar tidak mengejar keuntungan pribadi dengan memastikan manajer berkerja untuk memaksimalkan nilai jangka panjang perusahaan (Khurana 2009). Chen dkk. (2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak adalah strategi perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajaknya dengan memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak memiliki tujuan agar perusahaan tetap membayar pajak tetapi kesejahteraan perusahaan tetap optimal karena laba perusahaan tetap tinggi. Pemegang saham institusi yang memiliki investasi jangka panjang dapat dibuktikan dengan kepemilikan yang besar dan stabil. Oleh karena itu, pemegang saham institusional mampu memonitor manajer guna memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuannya yaitu memaksimalkan nilai jangka panjang dibandingkan memenuhi tujuan jangka pendek dengan cara menghindari praktik agresivitas pajak (Khurana 2009).

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Struktur kepemilikan asing atau yang biasa disebut sebagai Penanam Modal Asing (PMA) memiliki kinerja yang berkualitas dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi (Ghazali 2010). Terdapat beberapa alasan investor asing menanamkan modalnya di luar negeri salah satunya mengenai sistem perpajakan yang berbeda di setiap negara (Salihu dkk. 2015). Hasan dkk. (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung meminimalisir kegiatan agresivitas pajak. Investor asing yang berasal dari negara dengan tingkat perlindungan yang kuat mampu memperbaiki kualitas *corporate governance* yang lemah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aggarwal dkk. (2011) yang menemukan adanya peningkatan investor asing akan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan. Adanya mekanisme *corporate governance* yang kuat mampu memberikan kontrol kepada manajer agar melakukan strategi perencanaan pajak yang baik sehingga akan mencegah perusahaan dalam melakukan kegiatan agresivitas pajak.

METODOLOGI PENELITIAN**Populasi dan Sampel**

Sampel penelitian ini adalah perusahaan pada sektor manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur karena beberapa alasan. Pertama, sektor manufaktur merupakan sektor yang melakukan agresivitas pajak paling tinggi di antara sektor yang lainnya berdasarkan penelitian (Astuti dan Aryani 2016; Wahab, Ariff, dan Marzuki 2017). Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan dengan memanfaatkan hutang sebagai sumber pinjaman untuk meminimalkan beban pajak. Kedua, penelitian Setyawan dkk. (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *capital intensity*, maka semakin besar agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manufaktur memiliki banyak aset tetap berupa mesin-mesin, tanah serta bangunan untuk menunjang proses produksi. Hal tersebut menimbulkan biaya depresiasi dan biaya penyusutan yang tinggi karena biaya tersebut diindikasikan akan mengurangi penghasilan perusahaan sehingga berdampak pada pengurangan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria. Terdapat 229 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019. Hasil akhir penelitian didapatkan sebanyak 200 perusahaan selama dua tahun pengamatan (Tabel 1).

Tabel 1
Hasil Pengambilan Sampel

Kriteria	Total
Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019	229
Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2018-2019	(8)
Perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2018-2019	(90)
Perusahaan memakai mata uang selain rupiah dalam laporan tahunannya selama periode 2018-2019	(20)
Jumlah sampel penelitian	111
Periode pengamatan penelitian	2 tahun
Jumlah sampel yang diteliti	222
Data <i>outlier</i>	(22)
Total data yang digunakan	200

Sumber: Data diolah, 2020

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk memperkecil beban pajak guna memaksimalkan pendapatan melalui perencanaan pajak. Semakin banyak cara yang digunakan dalam meminimalkan bebannya maka perusahaan semakin agresif dalam melakukan manajemen perpajakan (Hidayati dan Diyanty 2018). Pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Book Tax Difference* (BTD). Rumus yang digunakan adalah dengan mengurangi laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset (Lin, Tong, dan Tucker 2014; Wilson 2009). Menurut Mills (1998) semakin besar pendapatan buku perusahaan melebihi pendapatan kena pajaknya maka semakin agresif perusahaan dalam mengelola pelaporan pajaknya. Nilai BTD semakin rendah mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak yang tinggi begitu juga sebaliknya (Firmansyah 2018).

Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Penelitian ini mengukur kepemilikan terkonsentrasi sebagai presentase saham terbesar yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (Nuryaman 2009). Kepemilikan pemerintah merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau yang biasa dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengukuran variable ini dengan menggunakan jumlah presentase kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (Margaritis dan Psillaki 2010).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh beberapa lembaga atau institusi seperti bank dan lain sebagainya. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan total presentase saham yang dimiliki oleh perusahaan institusi seperti asuransi, bank, dana pensiun, reksadana ataupun investasi (Margaritis dan Psillaki 2010). Variabel terakhir yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah kepemilikan atas suatu perusahaan oleh warga negara asing, badan hukum asing maupun pemerintah asing. Sama halnya dengan kepemilikan institusional, penentuan jenis kepemilikan menggunakan jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak asing baik individu maupun institusi (Margaritis dan Psillaki 2010). Variabel kontrol yang digunakan mencakup *leverage*, *Return on Asset* (ROA), dan ukuran perusahaan (*size*).

Model regresi pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 OC + \beta_2 GOV + \beta_3 INS + \beta_4 FOR + \beta_5 LEV + \beta_6 ROA + \beta_7 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

TA = agresivitas pajak; α = konstanta; β = koefisien regresi; OC = kepemilikan terkonsentrasi, GOV = kepemilikan pemerintah; INS = kepemilikan institusional; FOR (*Foreign*) = kepemilikan asing, LEV = Hutang terhadap ekuitas, ROA = Laba atas asset; SIZE = ukuran perusahaan, ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Rata-rata variabel agresivitas pajak (BTD) sebesar 0,015512. Rata-rata ini menunjukkan selisih antara laba fiskal dan laba akuntansi sebesar 1,5% dari total asetnya.

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

maka dapat disimpulkan bahwa presentase sampel penelitian ini dalam melakukan agresivitas pajak tergolong rendah. Sedangkan nilai minimum dan maksimum BTD sebesar -0,036200 dan 0,104800 yang menunjukkan bahwa nilai BTD yang paling tinggi merupakan perusahaan yang paling gencar dalam melakukan agresivitas pajak begitu pun sebaliknya. Rata-rata variabel kepemilikan terkonsentrasi sebesar 0,552411. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur pada penelitian ini memiliki rata-rata pemegang saham terkonsentrasi cukup tinggi yaitu sebesar 55%. Nilai terendah kepemilikan saham oleh pemegang saham terkonsentrasi sebesar 0,161400 atau sebesar 16% sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,925000 atau sebesar 92% yang dimiliki oleh PT Sinar Mas Agro Tbk.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	Observasi	<i>Mean</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Std. Deviation</i>
BTD	200	0,015512	-0,036200	0,104800	0,026708
OC	200	0,552411	0,161400	0,925000	0,213532
GOV	200	0,007726	0,000000	0,510100	0,056988
INS	200	0,747592	0,000000	0,999500	0,261994
FOR	200	0,257278	0,000000	0,976000	0,319660
LEV	200	0,905348	-2,214500	5,442600	0,832276
ROA	200	0,069135	0,000500	0,466600	0,068116
SIZE	200	0,124200	0,109900	0,145500	0,006700

Variabel kepemilikan saham oleh pihak pemerintah dalam perusahaan manufaktur memiliki nilai yang berkisar antara 0,000000 hingga 0,510100. Sedangkan nilai rata-rata kepemilikan pemerintah di perusahaan manufaktur sebesar 0,007726. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan oleh pihak pemerintah pada perusahaan manufaktur tergolong rendah hanya 0,7%. Kepemilikan saham oleh pihak institusional pada perusahaan manufaktur memiliki rata-rata sebesar 0,747592. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan oleh pihak institusi dalam perusahaan manufaktur tergolong tinggi yaitu sebesar 74%. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,999500 atau sebesar 99% dimiliki oleh PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk pada tahun 2018, PT Indofood CBP Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2018, PT Sinar Mas Agro Tbk serta PT Tunas Alfin Tbk. Nilai kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan manufaktur berkisar antara 0,000000 hingga 0,976000. Sedangkan presentase terbesar pemegang saham oleh pihak asing dalam perusahaan manufaktur menempati nilai sebesar 97% yang dimiliki oleh PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Rata-rata yang dimiliki kepemilikan asing sebesar 0,257278 hal tersebut menyimpulkan bahwa

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

kepemilikan oleh pihak asing dalam perusahaan manufaktur periode 2018-2019 tergolong rendah hanya sebesar 25%.

Nilai rata-rata untuk variabel kontrol *leverage* yang diproksikan menggunakan DER sebesar 0,905348. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur tidak terlalu mengandalkan pendanaan yang berasal dari hutang. Variabel kontrol *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai sebesar 0,000500 hingga 0,466600 sedangkan rata-ratanya sebesar 0,069135. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur mampu menghasilkan *net income* dengan menggunakan asetnya tetapi masih tergolong rendah. Selain itu perusahaan manufaktur didominasi aset tetap yang tinggi dalam menjalankan proses produksinya. Variabel kontrol *size* memiliki rata-rata sebesar 0,124200. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki aset yang besar.

Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan analisis regresi, maka dilakukan uji model yaitu uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*. Berdasarkan pengujian tersebut terpilihlah *Random Effect Model* (REM) sebagai metode yang tepat dalam penelitian ini. Ajija, Shochrul Rohmatul (2011) menjelaskan dalam bukunya bahwa data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik dikarenakan terdapat beberapa keunggulan yang mendasarinya (Verbeek, 2000; Gujarati, 2003; Wibisono, 2005; Aulia, 2004:27).

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob
Variabel Independen			
OC	-0,012763	-14,43268	0,0000*
GOV	0,010886	0,427881	0,6692
INS	0,008393	5,550312	0,0000*
FOR	-0,014506	-5,206924	0,0000*
Variabel Kontrol			
LEV	0,001988	4,130043	0,0001*
ROA	0,079380	4,983180	0,0000*
SIZE	1,797344	41,42996	0,0000*
R ²	0,260423		
Adjusted R ²	0,233459		
F-statistik	9,658275		
Prob(F-statistik)	0,000000		

*sig 5%

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis dari variabel penelitian ini. Berdasarkan hasil uji regresi untuk kepemilikan terkonsentrasi (OC) memiliki t-statistik sebesar -14,43268 dengan signifikansi sebesar 0,0000 ($\text{sig} < 0,05$). Hasil ini mengunjukkan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif dan mendukung Hipotesis 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan terkonsentrasi maka perusahaan akan meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Masripah dkk. (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mendukung pernyataan Badertscher dkk. (2013) dan Fama dan Jensen (1983) yang menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali menjadi lebih *risk averse* terhadap penghindaran pajak, karena merupakan aktivitas yang mengeluarkan banyak biaya yang signifikan seperti biaya ahli pajak, sanksi reputasi serta denda yang harus dibayar kepada otoritas pajak. Akibat adanya pertimbangan antara besarnya biaya dan manfaat yang didapatkan, maka pemegang saham pengendali cenderung meminimalisir kegiatan agresivitas pajak.

Hasil uji hipotesis pada Tabel 3 menunjukkan variabel kepemilikan pemerintah (GOV) memiliki t-statistik sebesar 0,427881 dengan signifikansi sebesar 0,6692 ($\text{sig} > 0,05$). Artinya, kepemilikan saham oleh pihak pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga H_2 tidak terdukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tidaknya kepemilikan pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan Chan dkk. (2013); Pratiwi dan Ardiyanto (2018); Ying dkk. (2017); Zeng (2010); Jian dkk. (2012). Sedangkan hasil penelitian sejalan dengan penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013) dan Shleifer dan Vishny (2007) yang menjelaskan bahwa perusahaan milik pemerintah memiliki tujuan utama terkait bidang sosial dan politik dibandingkan meningkatkan laba. maka dari itu, tindakan agresivitas pajak bukan merupakan tujuan penting yang hendak dicapai oleh perusahaan pemerintah. Tidak terdukungnya H_2 pada penelitian ini dapat disebabkan perusahaan manufaktur di Indonesia yang menjadi sampel tidak banyak yang dimiliki oleh pemerintah. Bahkan hanya terdapat dua perusahaan yaitu PT Delta Jakarta dan PT Semen Indonesia.

Variabel kepemilikan institusional (INS) memiliki *t-statistic* sebesar 5,550312 dengan signifikansi sebesar 0,0000 ($\text{sig} < 0,05$). Artinya kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif sehingga H_3 tidak terdukung. Artinya bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusi maka perusahaan cenderung terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2020); Khurana dan Moser (2013); Maraya dan Yendrawati (2016); Ying dkk. (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anggraini dan Widarjo (2020) yang menyatakan bahwa investor institusional hanya melakukan investasi jangka pendek untuk mengejar keuntungan semata sehingga orientasi investor institusional bukan untuk menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Porter (1992) menjelaskan bahwa investor institusional jangka pendek hanya berinvestasi dalam jumlah kecil dengan tujuan mendapatkan laba jangka pendek.

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

Pernyataan tersebut didukung oleh Bushee (1998) yang menjelaskan bahwa ketika investor institusional jangka pendek meningkat maka manajer perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan laba jangka pendek dengan mengorbankan pendapatan masa depan perusahaan.

Pada variable kepemilikan asing untuk variabel kepemilikan asing (FOR) memiliki t-statistik sebesar -5,206924 dengan signifikansi sebesar 0,0000 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga H_4 terdukung. Maka dari itu, semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak asing maka perusahaan semakin meminimalisir agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Hasan dkk. (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasan dkk. (2016) menyatakan bahwa investor asing cenderung meminimalisir kegiatan agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan investor asing membawa praktik bisnis yang baik untuk perusahaan, seperti peningkatan kinerja yang jauh lebih baik, peningkatan *good corporate governance*, serta kemajuan inovasi. Adanya praktik bisnis tersebut mempengaruhi investor asing untuk cenderung meminimalisir kegiatan yang akan memberi dampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini didukung oleh Aggarwal dkk. (2011) yang menemukan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan saham oleh pihak asing dalam perusahaan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas *corporate governance* perusahaan tersebut.

Untuk variabel kontrol baik *leverage*, *Return on Asset (ROA)*, ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan hasil positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka perusahaan akan semakin cenderung dalam melakukan agresivitas pajak. Tingkat hutang yang semakin tinggi merupakan salah satu strategi perusahaan menurunkan beban pajaknya dengan memanfaatkan beban bunga dari hutang. Semakin besar bunga yang dibebankan pada perusahaan maka semakin mengurangi beban pajak perusahaan. Selanjutnya Semakin besar ROA perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, jika ROA dalam perusahaan tinggi maka dapat dikatakan laba yang dihasilkan optimal. Laba yang besar akan memotivasi manajer perusahaan untuk memperkecil pajak yang dibebankan terhadap perusahaan. Terakhir, *size* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa laba yang perusahaan juga besar yang diperoleh dari tingkat produktivitas yang optimal. Dengan semakin meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung. Sehingga untuk perusahaan yang berukuran besar akan cenderung memanfaatkan sumber daya yang ahli dalam hal perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertama, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kedua, kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketiga, kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati
 JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

penelitian ini memiliki beberapa rekomendasi praktis. Pertama, investor dapat mempertimbangkan struktur kepemilikan dalam keputusan investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran pemilik asing dan kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan peran pemantauan yang efektif pada perusahaan sehingga dapat mengurangi agresivitas dari manajemen pajak perusahaan. Kedua, investor dapat melihat tren rata-rata kepemilikan institusi pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang memiliki tujuan investasi jangka pendek mengabaikan risiko jangka panjang sehingga cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu Pertama, pada pencarian data variabel kepemilikan asing tidak memisahkan antara pemodal institusional dan perorangan. Hal ini dikarenakan bentuk investor memiliki karakteristik yang berbeda dalam segi pengambilan risiko. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) sebagai proksi agresivitas pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memisahkan antara pemodal institusional asing dan perorangan. Kemudian untuk pengukuran agresivitas pajak dapat menggunakan *Earning Tax Ratio* (ETR), *Cash Earning Tax Ratio* (CETR) atau lain sebagainya. Tujuannya adalah agar dapat melihat praktik agresivitas pajak secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Aggarwal, Reena., dkk. 2010. Does Governance Travel Around The World? Evidence From Institutional Investors. *Journal of Financial Economics*.
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5).
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2-3), 228-250.
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board meeting attendance and corporate tax avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51-66.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*.
- Bradshaw, M. (2018). Agency Costs and Tax Planning when the Government is a Major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67(2-3), 255-277.
- Bushee, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. *Accounting review*, 305-333.
- Chan, K. H., Mo, P. L., & Zhou, A. Y. (2013). Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China. *Accounting & Finance*, 53(4), 1029-1051.
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International Corporate. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 1-36.

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Frank, M. M. (2008). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Ghazali, N. A. M. (2010). Ownership structure, corporate governance and corporate performance in Malaysia. *International Journal of Commerce and Management*.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. Bank of Finland Research Discussion Paper, 26, 1-46
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(1), 46-60.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Jian, M., Li, W., & Zhang, H. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. School of Accountancy: Singapore Management University, 1-40.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111-134.
- Khurana, I. K. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness *. SSRN Electronic Journal, 573, 0-42.
- Kurniati, D. (2020). Tax Ratio Indonesia Rendah, Ini Kata Sri Mulyani. https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani-21793?page_y=1200
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen laba, corporate governance, kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 108-123.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1), 222-279.
- Lee, R., & Kao, H. (2018). The Impacts of IFRSs and Auditor on Tax Avoidance. *Advances in Management & Applied Economics*, 8(6), 17-53.
- Lietz, G. M. (2013). Tax avoidance vs. tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. *Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*.
- Lin, S., Tong, N., & Tucker, A. L. (2014). Corporate tax aggression and debt. *Journal of Banking & Finance*, 40, 227-241.
- Mafrolla, E., & D'Amico, E. (2016). Tax aggressiveness in family firms and the non-linear entrenchment effect. *Journal of family business strategy*, 7(3), 178-184.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI 2010-2014). *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, Indonesia*.
- Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. *Journal of banking & finance*, 34(3), 621-632.
- Masripah, Diyanty, V., Fitriyani, D., & 2014. (2014). Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-23.
- Mills, L. F. (1998). Book-Tax Differences and Internal Revenue Service Adjustments. *Journal of Accounting Research*, 36(2), 343.

Vandalucia Faradhilah Verose & Isna Putri Rahmawati

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

- Nuryaman, N. (2009). Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 89-116.
- Pratama, M. Y., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pratiwi, D. A., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).
- Porter, M. E. (1992). Capital disadvantage: America's failing capital investment system. *Harvard business review*, 70(5), 65-82.
- Porter, M. E. (1992). Capital choices: Changing the way America invests in industry. *Journal of Applied Corporate Finance*, 5(2), 4-16.
- Salihu, I. A., Anuar, H. A., Normala, S., & Obid, S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138-147.
- Setiawan, D., Bandi, Phua, L, K & Trinugroho, I. (2016). Ownership structure and dividend policy in Indonesia. *Journal of Asia Business Studies*, 10(3):230-52.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of accounting and economics*, 31(1-3), 321-387.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2007). 12. Privatization in Russia: First Steps. In *The Transition in Eastern Europe, Volume 2* (pp. 137-164). University of Chicago Press.
- Utamaningsi, L. (2020). Perusahaan Keluarga, Koneksi Politik & Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 68-73.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 15-26.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313-332.
- Zhang, D., Gao, Z., Su, X., & Li, J. (2012). A comparison study of three degree-of-freedom parallel robotic machine tools with/without actuation redundancy. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 25(3), 230-247.
- Zeng, T. (2010). Ownership Concentration, State Ownership, and Effective Tax Rates: Evidence from China's Listed Firms. *Accounting Perspectives*, 9(4), 271-289.